

BAB II KAJIAN TEORITIK

2.1 Kajian Pustaka

1. Perkembangan Penalaran Moral
 - a. Pengertian Moral

Istilah “moral” dari segi etimologis, menurut K. Prent (dalam desmita, 2009) berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, hal.1059) mengartikan moral sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh umum. Menurut Kohlberg moral adalah bagian dari penalaran moral (moral reasoning), sehingga iapun menamakannya dengan penalaran moral (moral reasoning) (Desmita, 2009, hal. 206). Bermoral artinya, mempunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak mulia. Piaget (tt) mendefinisikan moral sebagai dorongan kuat yang baik serta patuh terhadap peraturan-peraturan yang diikuti dengan tanggung jawab yang obyektif dan berkaitan erat dengan peraturan-peraturan yang sudah pasti. Menurut Magnis Suseno (tt), kata moral selalu menunjuk pola manusia sebagai manusia.

Menurut Ar-Rozi (tt) dalam Sudarsono (2010, hal.59) etika atau moral adalah sebagai obat pencahar rohani (spiritual physic), merupakan sebuah penjelasan yang terpercaya mengenai ajaran plato tentang jiwa yang mempunyai tiga bagian untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan lurus nya moral spiritual jiwa (Sudarsono, 2010, hal.56).

Norma moral adalah norma untuk mengukur betul salahnya suatu tindakan manusia sebagai manusia, bukan untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia yang berkaitan dengan kecakapan atau keterampilannya dalam suatu pekerjaan tertentu. Moral berkaitan dengan nilai, norma dan tata aturan yang berakar pada pengendalian dari dalam diri sendiri (self control). Sedangkan kata moral sendiri berasal dari kata mores dalam bahasa latin yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, kebiasaan. Tingkah laku yang bermoral menurut Gunarsa ialah tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai tata cara/adat yang ada dalam suatu kelompok Nilai-nilai adat ini mungkin berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Bahkan di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat bermacam-macam batasan mengenai nilai-nilai moral. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan suatu kelompok sosial atau masyarakat (Mardiya, 2010, hal.01).

Perilaku moral adalah perilaku yang mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu. Moral dalam hal ini berarti adat kebiasaan atau tradisi. Perilaku tidak bermoral berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut. Ketidakpatuhan ini bukan karena ketidakmampuan memahami harapan kelompok tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap harapan kelompok sosial tersebut, atau karena kurang merasa wajib untuk mematuhi. Perilaku di luar kesadaran moral adalah perilaku

yang menyimpang dari harapan kelompok sosial yang lebih disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan dalam memahami harapan kelompok sosial.

Piaget dan Kohlberg (Coles dalam Dorba, 2001) menerangkan bahwa pemikiran moral seorang anak, terutama ditentukan kematangan kapasitas kognitifnya (pengetahuan) sedangkan di sisi lain, lingkungan social merupakan pemasok materi mentah yang akan diolah oleh kognitif anak tersebut secara aktif. Dalam interaksi social dengan teman-teman sepermainan. (pranoto, 2009, hal.2)

B. Perkembangan Moral

Menurut Gibb dkk. (2003) Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal, yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia tidak terlibat dalam interaksi social dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi social dan penyelesaian konflik (Santrock J. W., 2007, hal.117). Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain (Santrock J. W., 2002). Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orangtuanya. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berperilaku

sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam mengembangkan moral anak, peranan orangtua sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih kecil (Yusuf LN, 2004, hal.133).

Perkembangan moral bergantung pada perkembangan kecerdasan. Ia terjadi dalam tahapan yang dapat diramalkan yang berkaitan dengan tahapan dalam perkembangan kecerdasan. Dengan berubahnya kemampuan menangkap dan mengerti, anak-anak bergerak ke tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi. Sementara urutan tahapan perkembangan moral tetap, usia anak mencapai tahapan ini berbeda menurut tingkat perkembangan kecerdasan mereka (Hurlock, 1990, hal.79).

C. Perkembangan Penalaran Moral

Kohlberg (1958) dalam Santrock (2007) berpendapat bahwa cara berfikir tentang moral berkembang dalam tahapan. Tahapan ini menurut Kohlberg bersifat universal. Kohlberg sampai pada pandangannya ini setelah selama 20 tahun menggunakan wawancara unik terhadap anak. Dalam wawancara ini, anak diberi serangkaian cerita dimana karakter ceritanya menghadapi dilemma moral (Santrock J. W., 2007, hal.118).

Kohlberg (dalam Yusuf LN, 2004, hal.134) mengklasifikasikan menjadi tiga tingkat, yaitu sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Penalaran Moral

Tingkat (level)	Tahap (stage)
<p>1. Pra konvensional</p> <p>Pada tahap ini, anak mengenal baik buruk, benar-salah suatu perbuatan, dari sudut konsekuensi (dampak/ akibat) menyenangkan (ganjaran) atau menyakitkan (hukuman) secara fisik, atau anak tidaknya akibat perbuatan yang diterima.</p>	<p>1. Orientasi hukuman dan kepetuhan</p> <p>Anak menilai baik-buruk, atau benar-salah dari sudut dampak (hukuman atau ganjaran) yang diterimanya dan yang mempunyai otoritas (yang membuat aturan), baik orangtua atau orang dewasa lainnya. Disini anak mematuhi aturan orangtua agar terhindar dari hukuman.</p> <p>2. Orientasi relativis-instrumental</p> <p>Perbuatan yang baik/benar adalah yang berfungsi sebagai instrument (alat) untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri. Dalam hal ini hubungan dengan oranglain dipandang sebagai hubungan orang di pasar (hubungan jual beli). Dalam melakukan atau memberikan sesuatu kepada orang</p>

	<p>lain, bukan karena rasa terima kasih atau sebagai curahan kasih sayang, tetapi bersifat pamrih (keinginan untuk mendapatkan balasan); “jika kau memberiku, maka aku akan memberimu”.</p>
<p>2. Konvensional</p>	<p>1. Orientasi kesepakatan antar-pribadi, atau orientasi anak manis (good boy/girl)</p> <p>Anak memandang suatu perbuatan itu baik, atau berharga baginya apabila dapat menyenangkan, membantu, atau di setujui/ ketertiban social</p> <p>2. Orientasi hukum dan ketertiban</p> <p>Perilaku yang baik adalah melaksanakan atau menunaikan tugas/ kewajiban sendiri, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial.</p>
<p>3. Pasca-konvensional</p> <p>Pada tahap ini ada usaha individu untuk mengartikan nilai-nilai atau prinsip-</p>	<p>1. Orientasi kontrol sosial legislatis</p> <p>Perbuatan/ tindakan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak-hak individual yang</p>

<p>prinsip moral yang dapat diterapkan atau dilaksanakan terlepas dari otoritas kelompok, pendukung, atau orang yang memegang/menganut prinsip-prinsip moral tersebut. Juga terlepas apakah individu yang bersangkutan termasuk kelompok itu atau tidak.</p>	<p>umum, dan dari segi aturan atau patokan yang telah diuji secara kritis, serta disepakati oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, perbuatan yang baik itu adalah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Orientasi prinsip etika universal</p> <p>Kebenaran ditentukan oleh keputusan kata hati, sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang logis, universalitas dan konsistensi. Prinsip-prinsip universalitas ini bersifat abstrak, seperti keadilan, kesamaan hak asasi manusia, dan penghormatan kepada martabat manusia.</p>
--	---

Tingkat I. Moralitas Prakonvensional

Pada tahap ini anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan terhadap ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Akan tetapi hal ini ditafsirkan dari segi akibat fisik atau kenikmatan perbuatan (hukuman, keuntungan, pertukaran perbaikan).

Atau dari kekuatan fisik mereka yang memaklumkan peraturan dan semua label tersebut. (Kohlberg, 1995, hal. 231)

Tahap 1. Kepatuhan dan orientasi hukuman. Anak-anak berasumsi bahwa otoritas-otoritas yang penuh kuasa yang menurunkan seperangkat aturan baku yang harus mereka patuhi tanpa protes. Kohlberg menyebut tahap ini pra-konvensional karena anak-anak masih bisa bicara sebagai anggota masyarakat, mereka melihat moralitas sebagai sesuatu yang eksternal – sesuatu yang orang dewasa katakan dan harus mereka lakukan (Crain, 2007, hal. 231).

Pada tahap ini akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya, tanpa menghiraukan arti dan manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindarkan dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya, dinilai sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri dan bukan karena rasa hormat terhadap tatanan moral yang melandasi dan yang didukung oleh hukuman dan otoritas (Kohlberg, 1995, hal. 231).

Tahap 2. Individualisme dan Pertukaran. Di tahap ini anak-anak mulai menyadari bahwa bukan hanya ada satu saja pandangan benar yang diturunkan otoritas-otoritas. Individu yang berbeda-beda memiliki sudut pandang yang berbeda pula. Kita mungkin bisa memerhatikan kalau anak-anak di tahap 1 dan 2 selalu membicarakan penghukuman. Namun begitu, cara mereka memandangnya berbeda. Di tahap 1, hukuman berkaitan erat dengan pikiran anak tentang

kesalahan; hukuman 'membuktikan' bahwa ketidakpatuhan itu keliru. Sedangkan di tahap 2 hukuman hanyalah sebuah resiko yang secara alamiah ingin dihindari setiap orang (Crain, 2007, hal. 232).

Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antara manusia dipandang seperti hubungan dipasar. Terdapat elemen kewajaran tindakan yang bersifat resiprositas dan pembagian sama rata, akan tetapi ditafsirkan secara fisik dan pragmatis. Resiprositas ini merupakan hal "jika engkau menggaruk punggungku, nanti aku juga akan menggaruk punggungmu", dan bukan karena loyalitas, rasa terima kasih atau keadilan (Kohlberg, 1995, hal. 232).

Tingkat II. Moralitas Konvensional

Pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau bangsa, dan dipandang sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri, tanpa mengindahkan tindakan yang segera dan nyata. Sikapnya bukan hanya konformitas terhadap harapan pribadi dan tata tertib sosial, melainkan juga loyal terhadapnya dan secara aktif mempertahankan, mendukung, dan membenarkan seluruh tata tertib itu serta mengidentifikasikan diri dengan orang atau kelompok yang terlibat.

Tahap 3. Hubungan-hubungan Antar-Pribadi yang Baik. Di tahap ini, anak-anak (yang sekarang biasanya memasuki usia remaja) melihat moralitas lebih daripada urusan-urusan sederhana. Mereka percaya manusia mestinya hidup menurut harapan keluarga dan komunitas, dan bertindak dengan cara-cara yang 'baik'. Tingkah laku yang baik berarti memiliki motif dan perasaan antar-pribadi yang baik seperti kasih, empati, rasa percaya, dan kepedulian pada orang lain (Crain, 2007, hal. 233).

Perilaku yang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh mereka. Terdapat banyak konformitas terhadap gambaran stereotip mengenai apa itu perilaku mayoritas atau "alamiah". Perilaku sering dinilai menurut niatnya, ungkapan "dia bermaksud baik" untuk pertama kalinya menjadi penting. Orang mendapatkan persetujuan dengan menjadi "baik". (Kohlberg, 1995, hal. 232)

Tahap 4. Memelihara Tatanan Sosial. Penalaran pada tahap 3 bekerja baik pada hubungan-hubungan dua pribadi di dalam anggota-anggota keluarga atau teman dekat, dimana mereka dapat membuat upaya nyata untuk mengetahui perasaan dan kebutuhan oranglain dan berusaha membantu mereka. Karena subyek pada tahap 4 membuat keputusan moral dari perspektif masyarakat secara menyeluruh, merekapun berfikir menurut perspektif sebagai anggota masyarakat yang mematuhi seluruh aturan (Crain, 2007, hal. 235).

Terdapat orientasi terhadap otoritas, aturan yang tetap dan penjagaan tata tertib sosial. Perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri, menghormati otoritas dan menjaga tata tertib social yang ada, sebagai yang bernilai dalam dirinya sendiri. (Kohlberg, 1995, hal. 232)

Tingkat III. Moralitas Pasca-Konvensional

Pada tahap ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabasahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut (Kohlberg, 1995, hal. 233)

Tahap 5. kontrak Sosial dan Hak-Hak individual. Pada tahap 5, anak-anak remaja mulai bertanya “apa yang membuat masyarakat menjadi baik?” mereka mulai memikirkan masyarakat dengan cara yang sangat teoritis, menengok ke belakang masyarakat mereka sendiri, dan mengkaji hak-hak dan nilai-nilai yang mestinya dipegang sebuah masyarakat. Mereka kemudian mengevaluasi masyarakat-masyarakat lain menurut pemahaman ini. Mereka bisa dikatakan mengambil perspektif yang mendahului masyarakat (Crain, 2007, hal. 236).

Pada umumnya tahap ini amat bernada semangat utilitarian. Perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak atau

ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Terdapat kesadaran yang jelas mengenai relativisme nilai dan pendapat pribadi bersesuaian dengannya, terdapat suatu penekanan atas aturan prosedural untuk mencapai kesepakatan. Terlepas dari apa yang telah disepakati secara konstitusional dan demokratis, hak adalah soal “nilai” dan “pendapat” pribadi. Hasilnya adalah penekanan dan kemungkinan untuk mengubah hukum berdasarkan dengan pertimbangan sosial mengenai manfaat sosial (dan bukan membekukan hukum itu sesuai dengan tata tertib gaya tahap 4). Di luar bidang hukum, persetujuan bebas dan kontrak merupakan unsur pangkat kewajiban. (Kohlberg, 1995, hal. 233)

Tahap 6. Prinsip-prinsip Universal. Para responden 5 bergerak menuju konsepsi masyarakat yang baik. Mereka menyatakan bahwa kita perlu (a) melindungi hak-hak individual tertentu, dan (b) menyelesaikan perselisihan melalui proses-proses demokratis saja tidak selalu menghasilkan sesuatu yang kita anggap adil secara intuitif (Crain, 2007, hal. 237).

Hak ditentukan oleh keputusan suara batin, sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada komprehensivitas logis, universalitas, konsistensi logis. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis (kaidah emas imperative kategoris) dan mereka tidak merupakan peraturan moral konkret seperti kesepuluh

perintah Allah. Pada hakikatnya ini adalah prinsip-prinsip universal keadilan, resiprositas dan persamaan hak asasi manusia serta rasa hormat terhadap manusia sebagai pribadi individual (Kohlberg, 1995, hal. 233-234).

b. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Penalaran Moral

Satu faktor penting dalam perkembangan penalaran moral adalah factor kognitif, terutama kemampuan berfikir abstrak dan luas (Budiningsih, 2004, hal. 32). Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan moral seseorang anak juga banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai tersebut dalam mengembangkan moral anak, peranan orang tua sangatlah penting terutama pada waktu anak masih kecil. Beberapa sikap orang tua yang perlu di perhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak, (Yusuf LN, 2004, hal. 133-134) diantaranya sebagai berikut:

a. Konsisten dalam mendidik anak.

Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak.

b. Sikap orang tua dalam keluarga

Secara tidak langsung, sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah terhadap ibu, atau sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan

moral anak, yaitu melalui proses peniruan (imitasi). Sikap orang tua yang keras (otoriter) cenderung melahirkan sikap disiplin semua pada anak, sedangkan sikap yang acuh tak acuh, atau sikap masa bodoh, cenderung mengembangkan sikap kurang bertanggung jawab dan kurang memperdulikan norma pada diri anak. Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua adalah sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah (dialogis), dan konsisten.

c. Penghayatan dan pengalaman agama yang dianut

Orang tua merupakan panutan (teladan) bagi anak, termasuk di sini panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Orang tua yang menciptakan iklim yang religius (agamis), dengan cara membersihkan ajaran atau bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada anak, maka anak akan mengalami perkembangan moral yang baik.

d. Sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma.

Apabila orang tua mengajarkan kepada anak, agar berperilaku jujur, bertutur kata yang sopan, bertanggung jawab atau taat beragama, tetapi orang tua sendiri menampilkan perilaku yang sebaliknya, maka anak akan mengalami konflik pada dirinya, dan akan menggunakan ketidak konsistenan (ketidakajegan) orang tua sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, bahkan mungkin dia akan berperilaku seperti orangtua.

c. Proses Perkembangan Moral

Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara (Yusuf LN, 2004, hal. 133-134), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah, atau baik dan buruk oleh orang tua, guru atau orang dewasa lainnya. Disamping itu, yang paling penting dalam pendidikan moral adalah keteladanan dari orang tua, guru atau orang dewasa lainnya dalam melakukan nilai-nilai moral.
- b. Identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya (seperti orang tua, guru, kiai, artis atau orang dewasa lainnya).
- c. Proses coba-coba (trial & error), yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan menghentikan.

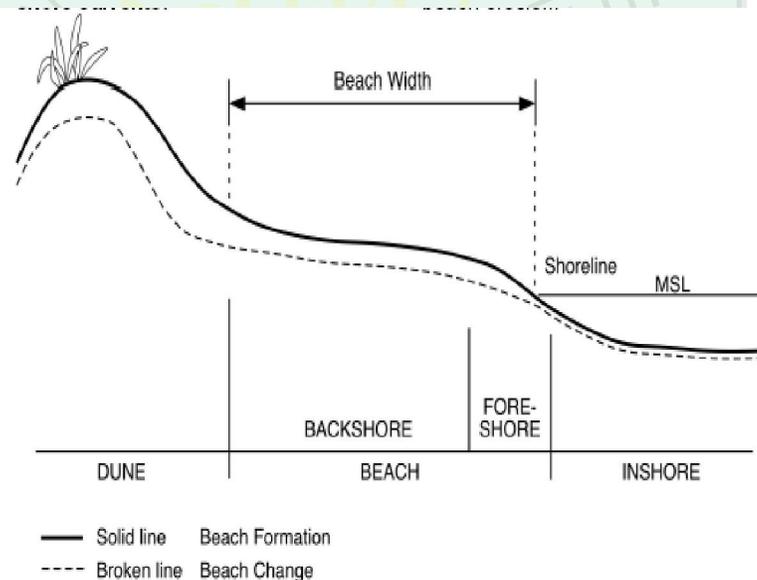
2. Pesisir Pantai

Definisi wilayah pesisir masih menjadi perdebatan banyak pihak mengingat sulitnya membuat batasan zonasi wilayah pesisir yang dapat

dipakai untuk berbagai tujuan kepentingan. Robert Kay (1999) mengelompokkan pengertian wilayah pesisir dari dua sudut pandang yaitu dari sudut akademik keilmuan dan dari sudut kebijakan pengelolaan. Dari sisi keilmuan Ketchum (1972) dalam Kay (1999) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai sabuk daratan yang berbatasan dengan lautan dimana proses dan penggunaan lahan di darat secara langsung dipengaruhi oleh proses lautan dan sebaliknya. Definisi wilayah pesisir dari sudut pandang kebijakan pengelolaan meliputi jarak tertentu dari garis pantai ke arah daratan dan jarak tertentu ke arah lautan. Definisi ini tergantung dari issue yang diangkat dan faktor geografis yang relevan dengan karakteristik bentang alam pantai (Hildebrand and Norrena, 1992 dalam kay & Alder, 1999).

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (intrusi) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (continental shelf), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung pada struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk tipe-tipe wilayah pesisir tersebut. Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua yang meluas (trailing edge) mempunyai konfigurasi yang landai dan luas. Ke arah darat dari garis pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan (collision edge), dataran pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan benuanya ke arah laut juga sempit.



Berdasarkan pada batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (interface) antara daratan dan laut. Wilayah pesisir memiliki potensi energi kelautan yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), serta memiliki potensi jasa-jasa lingkungan

(environmental services) seperti media transportasi, keindahan alam untuk kegiatan pariwisata, dan lain-lain.

3. Dataran Tinggi

Daerah dataran tinggi, termasuk pegunungan merupakan wilayah yang sulit dibangun jalan dan transportasi. Hal ini menyebabkan aktivitas sosial manusianya rendah. Biasanya manusia yang hidup di pegunungan menggunakan pakaian yang tebal untuk melindungi diri dari udara dingin, vegetasi di daerah dataran tinggi dan pegunungan juga biasanya berupa hutan. (Totok Gunawan dkk, 2004, hal.194).

Dataran tinggi atau pegunungan biasa disebut dengan masyarakat desa. Desa dalam arti umum adalah pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berpungupawija agraris. (Daldjoeni, 1998, hal.53).

Desa dengan lingkungan fisisbiotisnya adalah gabungan dari dukuh, dukuh ini sendiri dapat diwujudkan suatu unit geografis karena tersebar seperti pulau ditengah-tengah persawahan atau hutan (Daldjoeni, 1998, hal.53). Dukuh tersebut seperti pulau terapung di tengah lautan persawahan hijau. Didalam dukuh terdapat rumah-rumah penduduk tersebar di pekarangan masing-masing. Setiap pekarangan masih dihiasi lagi dengan berjenis-jenis pohon buah-buahan, kolam, ikan atau kandangkambing. Didalam dukuh air sawah dialirkan dari lereng-lereng bukit di luar desa (Daldjoeni, 1998, hal.68).

Desa dan masyarakatnya erat sekali hubungannya dengan alam. Terutama iklimlah yang pengaruhnya nampak pada permusimannya, seakan-akan mengatur kegiatan manusia dalam bertani (Daldjoeni, 1998, hal.59)

Penggunaan tanah di wilayah pedesaan adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi (Daldjoeni, 1998, hal.239)

Menurut dirjen Bangdes, perbandingan lahan dan manusianya cukup besar, lahan di desa relative lebih luas dibandingkan dengan jumlah penduduknya, sehingga kepadatan penduduk masih rendah (Daldjoeni, 1998, hal.60)

Penduduk di pegunungan umumnya terdiri atas mereka yang seketurunan, pemusatan tempat tinggal tersebut didorong oleh kegotong royongan mereka; jika jumlah penduduk kemudian bertambah lalu pemekaran desa pegunungan itu mengarah ke segala jurusan, tanpa adanya rencana. Sementara itu pusat-pusat kegiatan penduduk pun dapat bergeser mengikuti pemekaran (Daldjoeni, 1998, hal.62)

4. Pengaruh Lingkungan Terhadap Tingkah Perilaku

Beberapa ahli geografi telah mencoba menerangkan jatuh-bangunnya peradaban yang disebabkan oleh karakteristik lingkungan. Toynebee (dalam Veitch & Arkrilin, 1995) mengembangkan teori bahwa lingkungan (atau secara lebih spesifik topografi, iklim, vegetasi,

ketersediaan air, dan sebagainya) adalah tantangan bagi penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Tantangan lingkungan yang ekstrim akan merusak peradaban, sementara tantangan yang terlalu kecil akan mengakibatkan stagnasi kebudayaan. Lebih lanjut Toynbee mengusulkan bahwa tantangan lingkungan pada tingkat menengah mempengaruhi juga dapat mempengaruhi perkembangan peradaban. Pada tingkat yang makin berkurang atau sebaliknya makin berlebihan hasilnya justru akan memperlemah pengaruhnya. (Pendekatan Teori Dan Metode Psikologi Lingkungan, 2012)

Sedangkan teori yang berorientasi lingkungan dalam psikologi lebih banyak dikaji oleh behavioristik. Perilaku terbentuk karena pengaruh umpan balik (pengaruh positif dan negative) dan pengaruh modeling. Dilukiskan bahwa manusia sebagai black-box yaitu kotak hitam yang siap dibentuk menjadi apa saja. Dalam psikologi lingkungan, teori yang berorientasi lingkungan, salah satu aplikasinya adalah geographical determinant yaitu teori yang memandang perilaku manusia lebih ditentukan factor lingkungan dimana manusia hidup yaitu apakah di pesisir, di pegunungan, ataukah di daratan. Adanya perbedaan lokasi dimana tinggal dan berkembang akan menghasilkan perilaku yang berbeda. (Helmi, 1999, hal.7)

Pada akhir abad 18, seorang tokoh geografi yang berasal dari USA, Ellsworth Huntington, mengemukakan aliran fisis determinis. Fisis

determinis adalah teori yang menyatakan bahwa karakteristik manusia dan budayanya disebabkan oleh lingkungan alamnya. (Firdhan, 2011, hal.1)

Arti singkat fisis ini adalah dimana lingkungan lah yang mempengaruhi perilaku manusia, Sebagai contoh: (Valepialoka, 2010, hal.1)

1. perilaku manusia di iklim tropis dan sub-tropis sangatlah berbeda, itu disebabkan dengan suasana iklim yang berbeda sehingga dari suasana iklim tersebut menyebabkan perilaku yang berbeda pula.
2. Orang yang berada di daerah yang dingin, harus menggunakan pakaian tebal untuk menghangatkan tubuhnya dan orang yang tinggal di daerah yang dingin biasanya lebih banyak mengkonsumsi minuman dan makanan yang hangat yang dapat menghangatkan tubuhnya seperti meminum wedang jahe dan lain-lain , sedangkan orang yang tinggal di daerah panas cenderung menggunakan pakaian tipis agar angin dapat mudah masuk ke tubuh dan orang yang tinggal di daerah panas lebih sering mengkonsumsi minuman yang memakai es batu an lebih sering mengkonsumsi minuman yang dingin-dingin.

Determinisme lingkungan, juga dikenal sebagai determinisme iklim atau determinisme geografi, adalah pandangan bahwa lingkungan fisik, bukannya kondisi sosial, yang menentukan kebudayaan. Penganut pandangan ini mengatakan bahwa manusia ditentukan oleh hubungan stimulus dan respon (hubungan lingkungan-perilaku) dan tidak bisa menyimpang dari hal itu. Argumen dasar dari determinisme lingkungan adalah bahwa aspek dari geografi fisik, khususnya iklim, memengaruhi

pemikiran individu, yang pada gilirannya akan menentukan perilaku dan budaya yang dibangun oleh individu tersebut. (id.wikipedia.org)

Determinisme mengungkapkan bahwa setiap aktivitas termasuk kognisi manusia (perilaku, keputusan, dan tindakan) adalah kausal ditentukan oleh peristiwa sebelumnya. Dalam argument filosofis, konsep determinisme dalam domain tindakan manusia sering dikontraskan dengan kehendak bebas. Determinisme lingkungan adalah teori yang menyatakan bahwa karakteristik manusia dan budayanya dan disebabkan oleh lingkungan alamnya. (Determinism lingkungan. 2011)

5. Kajian Islam Tentang Perkembangan Penalaran Moral

Dalam perspektif islam, kata moral sama dengan akhlak. Kata akhlak berasal dari kata kholako, dengan akar khulukun yang memiliki makna perangai, tabiat atau adat. Kata khulq dalam firman Allah SWT merupakan pemberian kepada Muhammad sebagai bentuk pengangkatan menjadi Rasul Allah. Sebagaimana Al-Qur'an S. Al-Qolam (68): 4 menyebutkan:

قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّسْمَعَةٍ

Artinya :

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti agung”

Akhlak sering dikaitkan dengan etika dan moral. Etika dan moral berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti yang sama; kebiasaan. Sedang budi pekerti dalam bahasa Indonesia merupakan kata majemuk dari kata budi dan pekerti. Budi berasal dari bahasa sansekerta yang berarti

yang sadar, pekerti berasal dari bahasa Indonesia sendiri yang berarti kelakuan (Mujiono, 2002, hal. 25).

Secara etimologi kedua istilah akhlak dan etika mempunyai kesamaan makna yaitu kebiasaan dengan baik dan buruk sebagai nilai kontrol. Selanjutnya Untuk mendapatkan rumusan pengertian akhlak dan etika dari sudut terminologi, ada beberapa istilah yang dapat dikumpulkan. Imam Al-Ghazali (1994) dalam kitab Ihya 'ulumiddin, menyatakan bahwa, Artinya: "Khuluk yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lairnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam." (Mujiono, 2002, hal. 86)

Akhlak bersumber pada agama. Peragai sendiri mengandung pengertian sebagai suatu sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang. Pembentukan peragai ke arah baik atau buruk, ditentukan oleh faktor dari dalam diri sendiri maupun dari luar, yaitu kondisi lingkungannya. Lingkungan yang paling kecil adalah keluarga, melalui keluargalah kepribadian seseorang dapat terbentuk. Secara terminologi akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Para ahli seperti Al-Gazali menyatakan bahwa akhlak adalah peragai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Peragai sendiri mengandung pengertian sebagai suatu sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang. (Mubarak, 2008, hal. 20-30)

Al-Ghazali berpendapat bahwa adanya perubahan-perubahan akhlak bagi seseorang adalah bersifat mungkin, misalnya dari sifat kasar kepada sifat kasian. Disini imam al-Ghazali membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan terhadap beberapa ciptaan Allah, kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah seperti langit dan bintang-bintang. Sedangkan pada keadaan yang lain seperti pada diri sendiri dapat diadakan kesempurnaannya melalui jalan pendidikan. Menghilangkan nafsu dan kemarahan dari muka bumi sungguh tidaklah mungkin namun untuk meminimalisir keduanya sungguh menjadi hal yang mungkin dengan jalan menjinakkan nafsu melalui beberapa latihan rohani (Bahreisj, 1981, hal. 41).

Sementara Ibnu Maskawaih dalam kitab tahdzibul Akhlak menyatakan bahwa :“Khuluk ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkank pemikiran”. Selanjutnya Ibnu Maskawaih menjelaskan bahwa keadaan gerak jiwa dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, bersifat alamiah dan bertolak dari watak seperti marah dan tertawa karena hal yang sepele. Kedua, tercipta melalui kebiasaan atau latihan (Mujiono, 2002, hal. 86).

Sedangkan menurut Amin (dalam Muslim, 1993) mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang dibiasakan. Maksudnya, sesuatu yang mencirikan akhlak itu ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu apabila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Ahmad Amin menjelaskan arti kehendak itu ialah ketentuan daripada

beberapa keinginan manusia. Manakala kebiasaan pula ialah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Daripada kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan ke arah menimbulkan apa yang disebut sebagai akhlak. Ibnu Maskawayh mengatakan akhlak ialah suatu keadaan bagi diri atau jiwa yang mendorong (diri atau jiwa itu) untuk melakukan perbuatan dengan senang tanpa didahului oleh daya pemikiran kerana sudah menjadi kebiasaan. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran-ajaran Islam dengan al- Qur'an dan as-Sunnah rasul sebagai sumber nilainya serta ijtihad sebagai metode berpikir Islami (Muslim, 1993, hal. 255).

Pola sikap dan tindakan diatas, mencakup pola-pola hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan sesama manusia termasuk diri sendiri dan dengan alam. Dengan demikian, ruang lingkup akhlak mencakup:

- 1) Pola hubungan manusia dengan Allah, seperti mentauhidkan Allah dan menghindari syirik, bertakwa kepada-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, berzikir dan bertawakkal kepada-Nya. Ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan pola ini, seperti: Artinya:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّيَ الْأَكْبَرُ الَّذِي يَخْتَارُ الْمَلَائِكَةَ أَهْلًا لَهُ وَالرُّسُلَ نَبِيًّا لَهُ وَالْأَنْبِيَاءَ رُسُلًا لَهُ وَالْأُمَّمَ أُمَّةً لَهُ وَالْأَرْضَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَالسَّمَاءَ مَطْرَقَةً لَهُ وَالْجِبَالَ حِجَابًا لَهُ وَالنَّجْمَ زِينَةً لَهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ نَارًا لَيْلًا وَنَهَارًا وَالْمَاءَ حَيَاةً لَهُ وَالْخَلْقَ عِبَادًا لَهُ وَالْحَيَاةَ عَمَلًا لَهُ وَالْمَوْتَ جَزَاءً لَهُ وَالْآخِرَةَ عِلْمًا لَهُ وَالْأَوَّلَةَ حَقًّا لَهُ وَالْحَقَّ كَلِمَةً لَهُ وَالْحَقَّ حَقًّا لَهُ وَالْحَقَّ حَقًّا لَهُ وَالْحَقَّ حَقًّا لَهُ

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَقُلُوا لَهُمْ كَلِمَةً وَسِيلًا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. Bertakwalah kepada Tuhanmu." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (039: 010).

- 2) Pola hubungan manusia dengan Rasulullah SAW, seperti menegakkan sunnah Rasul dan membaca shalawat. Ada pun ayat yang berhubungan dengan diutusnya nabi kemuga bumi yaitu:

قُلِّمْنَا سِدْرًا مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَكَلَّمْنَا جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ سَلَامًا وَجَاءكَ الْكَلِمَاتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَأُتِيكَ الْبُحُرُ الْمَجْمُوعَةَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggung jawaban) tentang penghuni-penghuni neraka. (02:119)

- 3) Pola hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti menjaga kesucian diri, berani dalam menyampaikan hak, memberantas kedloliman, bersyukur, rendah hati, dan tidak sombong. Tidak melakukan larangan-larangan Allah SAW, memahami diri dari marah, memaafkan orang, jujur, merasa cukup. Adapun ayat yang berhubungan dengan hal ini, seperti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْتَابِينَ
 الَّذِينَ هُمْ يُعَذِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا
 بَلْجُنُودَ اللَّهِ لَبَّاسًا سَوِيًّا
 أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
 إِلَى اللَّهِ حَاهِدِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا
 بَلْجُنُودَ اللَّهِ لَبَّاسًا سَوِيًّا
 أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
 إِلَى اللَّهِ حَاهِدِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا
 بَلْجُنُودَ اللَّهِ لَبَّاسًا سَوِيًّا
 أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
 إِلَى اللَّهِ حَاهِدِينَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka meanmpakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) menampakkan dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya keceali kepada suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanitawanita islam atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An- Nur: 30-31)

- 4) Pola hubungan dengan keluarga, seperti berbakti kepada orangtua, membantu material maupun moral kepada kerabat, menafkahi dan mendidik keluarga, saling taat dan menghargai antara suami istri.
- 5) Pola hubungan dengan masyarakat, seperti menegakkan keadilan, menjunjung tinggi musyawarah dan membela orang lemah, menjunjung tinggi ukhuwah kemanusiaan, saling tolong-menolong, pemurah, dan penyantun, menepati janji, saling berwasiat dalam kebenaran dan takwaan. (Muslim, 1993, hal. 255).

Moralitas memiliki tiga komponen, yaitu komponen afektif, kognitif dan perilaku. Komponen afektif atau emosional terdiri dari berbagai jenis perasaan (seperti perasaan bersalah atau malu, perhatian terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya) yang meliputi tindakan benar dan salah yang memotivasi pemikiran dan tindakan moral. Komponen kognitif merupakan

pusat dimana seseorang melakukan konseptualisasi benar dan salah dan membuat keputusan tentang bagaimana seseorang berperilaku. Komponen perilaku mencerminkan bagaimana seseorang sesungguhnya berperilaku ketika mengalami godaan untuk bebohong, curang, atau melanggar aturan moral lainnya. (Hasan A. B., 2006, hal. 262)

Komponen afektif moralitas (moral affect) merupakan berbagai jenis perasaan yang menyertai pelaksanaan prinsip etika. Islam mengajarkan pentingnya rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik sebagai sesuatu yang penting. Hadist menyatakan:

Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “malu itu pertanda dari iman.” (HR. Bukhari Muslim)

Malu dikatakan sebagai sebagian dari iman karena rasa malu dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermoral. (Hasan A. B., 2006, hal. 262)

Komponen kognitif moralitas (moral reasoning) merupakan pikiran yang ditunjukkan seseorang ketika memutuskan berbagai tindakan yang bersifat yang benar atau yang salah. Islam mengajarkan bahwa Allah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia dua jalan yaitu jalan kefasikan dan ketakwaan. Manusia memiliki akal untuk memilih jalan mana yang ia akan tempuh. Dalam Alqur'an dinyatakan:

قُلْ إِنَّمَا أَمُورِي إِلَى اللَّهِ وَإِلَى النَّبِيِّينَ ۗ إِنِّي اتَّبَعْتُ مَا نُوحِيَ إِلَيَّ وَهُوَ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ عَظِيمٍ

قُلْ إِنَّمَا أَمُورِي إِلَى اللَّهِ وَإِلَى النَّبِيِّينَ ۗ إِنِّي اتَّبَعْتُ مَا نُوحِيَ إِلَيَّ وَهُوَ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ عَظِيمٍ

Artinya “dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan

ketakwaannya, Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”
(QS Asy-Syam: 7-10)

Pilihan manusia tentang jalan yang akan ia pilih dalam konflik ini meentukan apakah ia menjadi orang yang baik atau tidak.

Komponen perilaku moralitas (moral behavior) merupakan tindakan yang konsisten terhadap tindakan moral seseorang dalam situasi dimana mereka harus melanggarnya. Islam menggambarkan bahwa memilih melakukan jalan yang benar seperti menempuh yang mendaki lagi sukar.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ وَمَا أَدَّبْتُ بِهِمْ ۚ لَوْلَا إِذْ سَأَلْتَهُمْ لَظَنُّوا أَنِّي مَدِينُ الْبَيْتِ ۚ وَكُلَّ إِلَهٍ لَّهُمْ شُرَكَاءٌ مُّشْرِكُونَ﴾

Artinya: “dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (Yang dimaksud dengan dua jalan ialah jalan kebajikan dan jalan kejahatan), tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar.” (QS. Al-Balad: 10-11)

Melakukan sesuatu yang benar merupakan pilihan bagi umat islam, meskipun sulit. (Hasan A. B., 2006, hal. 262)

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah meneliti tentang perkembangan penalaran moral, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh risa rahmawati mengenai “Perbedaan Perkembangan Penalaran Moral Siswa SMK Negeri 2 Malang Dan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” dari penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat perkembangan penalaran moral siswa SMKN 2

Malang dan mahasiswa fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian lain dilakukan oleh Zidni Imawan Muslimin yang dilakukan di Jogjakarta mengenai “Penalaran Moral Siswa Ditinjau Dari Jenis Lembaga Pendidikan Dan Tingkat Pendidikan Orangtua (Tesis)” menunjukkan bahwa Ada perbedaan penalaran moral antara siswa yang bersekolah di sekolah lanjutan tinggi pertama islam terpadu, madrasah Tsanawiyah dan sekolah lanjutan tingkat pertama umum, kedua tidak ada perbedaan penalaran moral antara siswa yang memiliki orangtua dengan tingkat pendidikan tinggi, menengah dan rendah.

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Ge Fang and Fu-Xi Fang dkk mengenai “Social Penalaran moral In Chinese Children: A Developmental Study” menunjukkan tahap yang universal seperti peningkatan pada penilaian moral dari yang rendah (tahap 1 dan 2) sampai pada yang lebih tinggi (tahap 3). Namun, budaya khusus penalaran moral juga ada. Sebagai contoh, dibandingkan dengan anak-anak dalam studi Kohlberg, keputusan moral anak-anak China menekankan penghormatan terhadap otoritas, altruisme, dan keprihatinan terhadap kebenaran moral yang saudara mereka. Para penulis berpendapat bahwa anak-anak Cina karakteristik moral yang dipengaruhi oleh konteks budaya.

Miller & Bersoff (1992) dalam Matsumoto (2008) membandingkan bagaimana para subyek di India dan di Amerika Serikat merespon suatu tugas penilaian moral. Para peneliti ini melaporkan bahwa subyek-subyek India,

anak-anak maupun orang dewasa, menganggap tindakan tidak menolong seseorang sebagai suatu pelanggaran moral dibanding subjek Amerika, terlepas dari apakah situasinya mengancam nyawa ataupun apakah orang yang butuh pertolongan itu merupakan sanak keluarga. Para peneliti kemudian menafsirkan bahwa perbedaan cultural ini terkait dengan nilai-nilai afiliasi dan keadilan, yang menunjukkan bahwa orang India memiliki rasa tanggung jawab social yang lebih luas – tanggung jawab individual untuk menolong orang yang membutuhkan. Snarey (1985) dalam Matsumoto (2008) mengulas penelitian-penelitian penalaran moral yang melibatkan subyek dari 27 negara. Snarey menyimpulkan bahwa penalaran moral jauh lebih khas-budaya daripada yang diajukan oleh Kohlberg. Teori Kohlberg, serta metodologi penyekoran tahapan moral berdasarkan penalaran verbal, mungkin tidak dapat melihat adanya tingkat-tingkat moralitas yang lebih tinggi di budaya-budaya lain. (Matsumoto, 2008, hal.118-120)

Penelitian-penelitian berikutnya telah menyimpulkan bahwa ada kemungkinan bahwa sebenarnya masyarakat lain khususnya non barat dapat mencapai tahap post-konvensional, hanya saja pemaknaan tentang penalaran moral post-konvensional itu berbeda dengan pemaknaan yang diberikan Kohlberg. Schweder (1990) dalam Dayakisni & Yuniardi (2008) menemukan moralitas post-konvensional berdasar penelitiannya di India dilandasi konsep hukum-hukum alam dan keadilan bukan prinsip individualism dan sekularisme atau kontrak social atau mungkin keluarga sebagai lembaga moral. Ma (1988) berdasar penelitiannya menyimpulkan bahwa orang-orang

cina menganggap moral baik adalah “maksud baik” (golden mean) yaitu perilaku yang seperti dilakukan mayoritas masyarakat, dan “kehendak baik” (good will) yaitu keutamaan untuk bergabung atau menurut kehendak alam. Sampel cina cenderung berpegang teguh pada hukum daripada sampel inggris dan mereka lebih menekankan “ch`ing” (kasih sayang) daripada “hi” (alasan rasional). Jadi dapat disimpulkan sebenarnya tiap-tiap budaya dapat mencapai tahap post-konvensional hanya pemaknaan tentang “moral baik” sangat beragam, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Kohlberg. Sehingga berawal dari inilah kemungkinan akan terjadi konflik antar sub-sub budaya (intercultural conflict) dari berbagai Negara di dunia ini. (Dayakisni & Yuniardi, 2008, hal.81)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada teori diatas maka peneliti mengambil hipotesis bahwa adanya perbedaan perkembangan penalaran moral antara anak yang tinggal di daerah pesisir pantai dan anak yang tinggal di daerah dataran tinggi kabupaten Tuban.